

ABSTRAK

Pendidikan inklusi merupakan system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ada banyak permasalahan adanya pendidikan inklusi di sekolah salah satunya adalah masih sangat kurangnya guru pembimbing untuk akan berkebutuhan khusus, peralatan dan perlengkapan yang sangat terbatas, pelatihan guru pendamping sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola pendidikan inklusi Sekolah Dasar kabupaten Banyumas yang ada di SDN 5 Arcawinangun dan SDN Watujaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus tata kelola (*governance*) dari UNDP dengan tiga kriteria yaitu partisipasi, transparan dan akuntabilitas. pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek dari partisipasi kerjasama antara guru dengan wali murid dalam penanganan anak berkebutuhan khusus sudah baik. SDN Arcawinangun ikut serta dalam biaya seperti pembayaran setiap bulannya dan pembayaran yang harus lunas selama 6 tahun. Dari aspek transparan sekolah terbuka atas perkembangan anak maupun kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Dalam administrasi selain perkembangan tidak di paparkan secara langsung kepada wali murid. Sedangkan aspek akuntabilitas, sekolah sudah memenuhi tanggung jawab dalam mengajar kepada siswa reguler maupun siswa ABK. Namun dalam administrasi biaya mereka tidak semua biaya diberi tahukan kepada wali murid.

Kata Kunci : Pendidikan Inklusi, Tata Kelola, Anak Berkebutuhan Khusus, guru, wali murid.

ABSTRACT

Inclusive education is an education system that provides opportunities for all students who have disabilities and have special intelligence or talent to participate in education or learning in an educational environment together with students in general. There are many problems with inclusive education in schools, one of which is the lack of supervising teachers for those with special needs, very limited equipment and supplies, very limited training for accompanying teachers.

This study aims to find out how the governance of inclusive education in Banyumas district elementary schools is at SDN 5 Arcawinangun and SDN Watujaran. The method used in this research is descriptive qualitative research with a case study of governance from UNDP with three criteria, namely participation, transparency and accountability. The selection of informants used was purposive sampling technique. Collecting data using interview, observation and documentation methods.

The results of this study indicate that the aspect of collaborative participation between teachers and students' guardians in handling children with special needs is good. SDN Arcawinangun participates in costs such as monthly payments and payments that must be paid off for 6 years. From the transparent aspect, the school is open to children's development and activities carried out by students. In administration other than developments are not explained directly to the guardians of students. While the accountability aspect, the school has fulfilled the responsibility in teaching to regular students and special needs students. However, in the administration of their fees, not all costs are notified to the parents.

Keywords: Inclusive Education, Governance, Children with Special Needs, teachers, parents.